

PAPER NAME	AUTHOR
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi	Muhammad Nahdlodim
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
3700 Words	26359 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
12 Pages	232.5KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
May 1, 2024 6:27 PM GMT+7	May 1, 2024 6:28 PM GMT+7

● 12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- Crossref database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Manually excluded text blocks
- Bibliographic material
- Cited material

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi

Efforts to Combat Terrorism Crimes from a Criminological Perspective

29 Abstract

This research aims to examine effort³⁰ to overcome criminal acts of terrorism from a criminological perspective. The urgency of this research is to suppress the growth of terrorist organizations and prevent terrorist attacks. This research is sociological juridical research. The results of the research show efforts to overcome criminal acts of terrorism from a criminological perspective: character identification and funding, national preparedness, counter-radicalization, de-radicalization, anticipating radical terrorism in prisons. The obstacles are: terrorism convicts and former terrorism convicts are still radical, society is permissive towards terrorists, legal sanctions for educational institutions and terrorist groups' charities are weak. The solution: coaching former convicts²¹ and terrorists, implementing the *jogo tonggo* program, accelerating regional action plans⁷ to prevent and overcome extremism that leads to violence (RAD PE), economic empowerment.

Keywords: Criminology; Countermeasures; Criminal act; Terrorism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi. Urgensi penelitian ini untuk menekan pertumbuhan organisasi teroris, mencegah serangan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi: identifikasi karakter dan pendanaan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalasi, deradikalasi, antisipasi radikal terorisme di Lapas. Kendalanya: narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme masih radikal, masyarakat permisif kepada teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal kelompok teroris lemah. Solusinya: pembinaan mantan narapidana terorisme, implementasi program *jogo tonggo*, percepatan ⁷rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan (RAD PE), pemberdayaan ekonomi.

Kata kunci: Kriminologi; Penanggulangan; Terorisme; Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memberikan amanat kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman keamanan, termasuk terorisme. Untuk itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Bagi negara berpenduduk heterogen dan multikultural seperti Indonesia,¹ terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi, keamanan dan kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisir, mempunyai jaringan luas dan memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu

¹ Zulianto Zulianto et al., "Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 419, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>.

⁸ dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.² Sejak 2018 hingga 2022, ¹⁵ Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) menangkap 1.517 terduga teroris. Tetapi potensi ancaman terorisme masih ada, bersifat dinamis dipengaruhi faktor nasional, politik global, media digital dilakukan laki-laki, perempuan berupa serangan tunggal, jaringan/non jaringan, kelompok.³ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendeteksi Jamaah Anshar Daulah (JAD), Jamaah Anshar Khilafah (JAK), Negara Islam Indonesia (NII), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Islamiyah (JI) masih aktif,⁴ cerdas berkamuflase, selektif dalam perekrutan,⁵ penggalangan dana, dan berjejaring dengan kelompok teroris di Jawa Tengah.

Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Melalui perspektif kriminologi, penelitian ini dapat menggali akar penyebab serta pola-pola perilaku pelaku terorisme, sehingga dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi terorisme juga penting untuk mengembangkan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang tepat guna. Penelitian tentang tindak pidana terorisme dalam perspektif kriminologi tidak hanya mendukung upaya penegakan hukum, tetapi juga memperkuat landasan untuk memahami dan menghadapi tantangan keamanan global pada masa kini dan masa mendatang.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas penanggulangan terorisme dalam substansi berbeda: penelitian oleh Guntara (2018) berfokus pada kajian kriminologi tindak pidana terorisme dari teori *differential association*. Hasil penelitian menyebutkan faktor terorisme: ideologi, tidak puas pada pemerintah, ekonomi, sosial, budaya, lemah memahami agama. Upaya penanggulangan terorisme: penegakan hukum, pembentukan BNPT, kontra radikalasi, deradikalasi, kerjasama internasional. Kelebihan penelitian ini : kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme bersesuaian dengan sifat terorisme sebagai kejahatan lintas negara. Kelemahan penelitian ini: pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak dijabarkan secara rinci.⁶

Penelitian oleh Kurniawan dkk (2020) berfokus pada penanggulangan tindak pidana terorisme melalui deradikalasi. Hasil penelitian: deradikalasi ³¹ melibatkan tokoh agama, ahli psikologi. Kelebihan penelitian ini: model

²Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang” (2018), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.

³I-khub BNPT, “Counter Terrorism And Violent Extremism,” 2023.

⁴BNPT.

⁵Sapto Priyono Guntur Yuyus Putra, “Mengungkap Perekran Jaringan Kelompok Teror Muhammadiyah At-Tauhid (MAT) Di Media Sosial,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 7 (2021): 2247–62.

⁶Deny Guntara dan Budiman, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 106–19, <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.553>.

deradikalisasi mengedepankan prinsip pendekatan jiwa, humanis, komunikasi sosial, pertisipasi masyarakat. Kelemahan penelitian ini program deradikalisasi yang dideskripsikan oleh peneliti bersifat normatif⁷

Penelitian oleh Pramana dkk (2022) berfokus pada aspek kriminologis penanggulangan terorisme. Hasil penelitian menyebutkan penyebab terorisme: salah menginterpretasikan agama, pengaruh politik nasional, regulasi pemerintah merugikan kelompok tertentu, provokasi kekerasan, kesadaran kelompok tertentu menjaga situasi kondusif rendah. Akibat terorisme: masyarakat resah, korban jiwa, kerugian ekonomi. Kelebihan penelitian ini: penanggulangan terorisme pendekatan persuasif disertai pendekatan represif, pengungkapan kasus. Kelemahan penelitian ini tidak menjelaskan latar belakang tokoh agama penyebar paham radikal, mengesankan mayoritas tokoh agama di wilayah hukum Polda Sumatera Utara mendukung terorisme.⁸

Berdasarkan ketiga penelitian itu, disimpulkan terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya secara general mengkaji upaya penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum, kerjasama internasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi. Penelitian ini khusus mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi menggunakan kearifan lokal "jogo tonggo". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi di Jawa Tengah, serta mengatasi hambatannya.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis berfungsi untuk meneliti sesuatu yang tampak dari aturan perundang-undangan sebagai pokok kajian dalam penelitian.⁹ Spesifikasi penelitian: deskriptif analitis. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik memilih narasumber untuk mendapatkan sumber data berdasarkan individu yang dinilai paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti.¹⁰ Data penelitian menggunakan: data primer, bersumber dari penelitian langsung di lapangan dengan metode wawancara,¹¹ observasi kelompok teroris secara *off line, online*. Data sekunder: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode penelitian: deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman dengan tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Kriminologi

⁷Syukri Kurniawan et al., “Upaya Non-Penal Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia,” Jurnal Yustisiabel 4, no. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.468>.

⁸Jaka Pramana et al.“Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia” Jurnal Retentum 3 (2022): 1–9, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1321>.

⁹Zaenal Arifin, Aisah Nur, dan Purnama Shonia Hugeng, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah,” Journal Juridisch 1, no. 1 (2023): 1–9.

¹⁰E A M Mardlatillah dan Z Hidayat, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang,” Journal Of Public Policy And Management Review 8 (2019): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.25128>.

¹¹Mardlatillah dan Hidayat.

¹²Arifin, Nur, dan Hugeng, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.”

¹¹ Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas, bukan warisan biologis. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dengan tingkat pendidikan berbeda, dilakukan secara sadar: difikirkan, direncanakan, diarahkan pada maksud tertentu, merupakan konsepsi yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan akibatnya.¹³ Terorisme menimbulkan dampak secara langsung, tidak langsung.¹⁴ Jejak terorisme di Jawa Tengah: bom Candi Borobudur,¹⁵ bom Gereja Kristen Alfa Omega,¹⁶ penembakan dua anggota Polri di Kenthengharjo,¹⁷ bom kotoran sapi,¹⁸ bom gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton,¹⁹ bom Mapolsek Pasar Kliwon Solo²⁰ perampokan BRI Reban, BRI Grobongan,²¹ bom Mapolresta Solo, penyerangan Mapolres Banyumas,²² penembakan Mako Brimob Purwokerto,²³ bom Pos Polisi Kartasura,²⁴ penyerangan Wakapolres Karanganyar²⁵ dan embrio terorisme itu masih ada sehingga penanggulangan terorisme perlu pendekatan kriminologi guna menekan pertumbuhan kelompok teror.

Untuk mengatasi ancaman keamanan yang kompleks ini, tindak pidana terorisme dari sudut pandang kriminologi memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Memahami komponen kriminologis yang mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam aktivitas terorisme merupakan langkah penting dalam penanggulangan terorisme. Ini meliputi analisis dinamika sosial, ekonomi, politik, dan psikologis yang memengaruhi radikalasi dan rekrutmen teroris. Selain itu, penelitian kriminologi juga dapat menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang pola perilaku pelaku terorisme, yang dapat membantu dalam pembuatan strategi pencegahan yang lebih baik. Selain itu, upaya penanggulangan terorisme harus melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan potensi ancaman terorisme. Pendekatan yang komprehensif dan

¹³ Fatlolon Contantinus, *Masalah Terorisme Global Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi Dunia Kehidupan Oleh Sistem Modern*, ed. Widiantoro, 6th ed. (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021).

¹⁴ Vincentia Wahju Widajatun, Nugi M Nugraha, dan Sakina Ichsan, "Kejadian Aksi Teroris Dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa Ihsg," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 141, <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.3415>.

¹⁵ Adi Renaldi, "Pemboman Candi Borobudur, 1985, Aksi Terorisme Agama Paling Misterius Era Orde Baru," *Vice.com*, 2020, <https://www.vice.com/id/article/dygypk/pemboman-candi-borobudur-1985-aksi-terorisme-agama-paling-misterius-era-orde-baru>.

¹⁶ Tim Liputan6, "Bom Kembali Menguncang Semarang," *Liputan6*, 2001.

¹⁷ Muh Syaifullah, "Dua Polisi Purworejo Ditemukan Tewas Tertembak Di Pos Jaga," *Tempo*, 2010.

¹⁸ Bagus Santosa, "Benda Mirip Bom Di Klaten Ternyata Kotoran Sapi," *Okezone*, 2010.

¹⁹ Yulis Sulistyawan, "Kronologi Bom Gereja Kepunton Solo," *Tribune News*, 2011.

²⁰ Rini Tustiningsih, "Polsek Pasar Kliwon Solo Diteror Bukan Kasus Pertama," *Solo Pos*, 2012, https://news.solopos.com/polsek-pasar-kliwon-solo-diteror-bom-bukan-kasus-pertama-3490497_gI=1*1mboasb*_ga*OTqwnjc4ntu5lje2otuwotg3mti.*_ga_n48jd3q0d2*mty5nta5odcxms4xljeumty5nta5odgxoc41oc4wlja.

²¹ Arnaz Farouk, "Kelompok Abu Roban Rampok 10 Tempat," *Beritasatu*, 2013.

²² Iqbal Fahmi, "Ini Kronologi Penyerangan Mapolres Banyumas Versi Densus 88," *Kompas*, 2017, <https://regional.kompas.com/read/2017/06/20/14505331/ini.kronologi.penyerangan.mapolres.banyumas.versi.densus.88?page=all>.

²³ Tim BBC, "Mako Brimob Purwokerto 'Ditembaki Orang Tidak Dikenal', Seorang Anggota Polisi Terluka," *BBC*, 2019.

²⁴ Aprilia Ika Devina Halim, "Pelaku Bom Bunuh Diri Di Pos Polisi Kartasura Terpapar ISIS Dan Merupakan Lone Wolf," *Kompas*, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/04/11153951/pelaku-bom-bunuh-diri-di-pos-polisi-kartasura-terpapar-isis-dan-merupakan>.

²⁵ Reporter Tv One, "Pria Bersenjata Tajam Yang Serang Wakapolres Karanganyar Jadi Buronan Polisi," *Tv One News*, 2020.

berbasis pengetahuan kriminologi diharapkan dapat membuat upaya penanggulangan terorisme lebih terarah dan berhasil dalam menangani ancaman ini.

Berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait memengaruhi munculnya terorisme di Indonesia. Kelompok ekstremis sering menggunakan interpretasi agama yang salah untuk membenarkan kekerasan. Mereka seringkali mengklaim berjuang untuk tujuan agama atau politik tertentu, mengubah ajaran agama utama untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan anggota baru. Faktor sosio-ekonomi juga penting; pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya akses ke pendidikan berkualitas tinggi dapat meningkatkan risiko radikalasi. Konflik dan diskriminasi berdasarkan etnis atau sektarian telah beberapa kali memperburuk keadaan, menyebabkan kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau dianiaya, mendorong beberapa anggotanya untuk mengambil tindakan ekstrem untuk mencapai keadilan. Sejarah intervensi asing dan konflik politik internasional juga berkontribusi pada peningkatan perasaan anti-Barat dan anti-intervensi, yang sering digunakan oleh kelompok teroris untuk mendapatkan dukungan. Kelompok teroris sering menggunakan kegagalan atau kelemahan pemerintah untuk mengkritik pemerintah dan mendapatkan dukungan. Selain itu, media dan teknologi kontemporer telah memudahkan penyebaran propaganda ekstremis, yang memungkinkan kelompok-kelompok ini mempengaruhi orang dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi di Jawa Tengah: pertama, identifikasi karakter teroris²⁶ berfokus penandaan ciri-ciri seseorang bersympati kepada terorisme. BNPT menyebutkan, indikator seseorang berpotensi menjadi teroris: eksklusif, intoleran, menganut paham takfiri. Menurut Analisis Kebijakan Humas Polri, indikator seseorang terpapar terorisme dilihat dari tingkat intoleransi, fanatisme, eksklusivitas, revolusi.²⁷ Identifikasi anatomi teroris berdasarkan militansi ada empat kelompok: a. Inti, b. Militan, c. Pendukung, d. simpatisan.²⁸

Kedua, identifikasi sumber pendanaan. Hasil penelitian Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalasi (PAKAR) menyebutkan sembilan lembaga amal pendukung terorisme, lima beroperasi di Jawa Tengah.²⁹ Lembaga amal itu sebagian masih beroperasi, berganti nama setelah pengurusnya dipidana. Teroris di Jawa Tengah memiliki sumber dana dari galian C dan parkir ilegal, jual beli kendaraan curian,³⁰ dan pinjaman *online* untuk mendapatkan uang. ini menggambarkan pendanaan terorisme makin kompleks, dan bervariasi,³¹

²⁶Parwoto, "Wawancara" (Solo, 2023).

²⁷Oki Wahju Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," Jurnal HAM 12, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.

²⁸Sholehuddin, 'Harmoni Untuk NKRI Panduan Praktis Cegah Teroris.'

²⁹Tim Pakar, "9 Lembaga Amal Pendukung Terorisme," Redaksi Pakar, 2020.

³⁰Parwoto, "Wawancara."

³¹Clarisa Permata dan Putri, "Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme."

Ketiga, kesiapsiagaan nasional³² bertujuan menciptakan kondisi siap siaga guna mengantisipasi terorisme¹⁴ secara terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan melalui: a. Pemberdayaan masyarakat, b. Peningkatan kemampuan aparatur, c. Perlindungan, peningkatan sarana-prasarana, d. Pengembangan kajian terorisme, e. Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Keempat, kontra radikalialisasi: proses terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan terhadap orang/kelompok orang yang rentan terpapar radikal terorisme untuk menghentikan paham radikal terorisme melalui: a. Kontra narasi, b. Kontra propaganda, c. Kontra ideologi melibatkan masyarakat sipil.

Kelima, deradikalisasi, proses deradikalisasi adalah langkah penting untuk mencegah kembalinya ke penjara dan membantu mereka reintegrasi ke dalam masyarakat.²⁸ Proses ini biasanya dimulai di penjara, di mana pelaku teroris menjalani program yang dimaksudkan untuk mengubah ideologi ekstrem mereka. Berbagai pendekatan digunakan dalam program deradikalisasi, seperti konseling individu dan kelompok, diskusi yang dipandu, dan kelas yang membahas prinsip toleransi, pemahaman agama yang lebih moderat, dan pentingnya koeksistensi damai. Dalam proses ini sering kali bergantung pada keterlibatan tokoh agama yang kredibel, yang dapat memberikan wawasan dan interpretasi yang benar tentang agama yang sering disalahpahami oleh teroris. Selain itu, sesi ini mungkin melibatkan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan peluang pekerjaan setelah mereka dibebaskan. Ini merupakan bagian penting dari pengurangan kemungkinan kembali ke jaringan teroris.

Keenam, antisipasi penyebaran ideologi radikal terorisme di Lapas. Sebagian pelaku terorisme menjalani rekrutmen di Lapas, antara lain : pelaku Bom Thamrin 14 Januari 2016 menjalani radikalialisasi di Lapas. Hal itu berbahaya karena Lapas menjadi episentrum terorisme.²⁴ Untuk itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur penempatan napiter berdasarkan faktor resiko yang ditimbulkan dan ada pada setiap narapidana, dan peningkatan kualitas pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku, menurunkan tingkat risiko narapidana.³³ Penempatan napiter itu berdasarkan klasifikasi, indikator tertentu dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, stabilitas, relasi dengan masyarakat pada napiter.¹² Napiter ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, Lapas *Minimum*

³²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

³³Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan” Nomor 65, no. 879 (2017): 2004–6, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/123963/Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/123963/Permenkumham%20Nomor%2035%20Tahun%202018.pdf).

³⁴Adhika Yovaldi Salah dan Umar Anwar, “Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximun Security,” Journal of Correctional Issue 4, no. 1 (2021): 33–45.

*Security*³⁵ guna mendapatkan pembinaan melalui pendekatan ideologi, agama, psikologi, ekonomi, sosial, budaya.³⁶

Mantan narapidana dibawah pengawasan ketat penegak hukum untuk mencegah mereka terlibat dalam aktivitas ekstrem. Mengingat faktor-faktor penting yang membedakan individu dari terorisme dan tingkat radikalasi mereka, program ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Metode yang kompleks dan berkelanjutan ini digunakan dalam proses deradikalasi untuk memastikan bahwa mantan tahanan terorisme dapat bergabung dengan masyarakat yang produktif dan damai.

3.2 Kendala dan Solusi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Kriminologi

⁴ Terorisme memiliki dampak langsung pada penikmatan hak asasi manusia. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah kontra terorisme yang efektif.³⁷ Kegagalan kebijakan penanggulangan terorisme Indonesia selama ini, yang hanya berfokus pada undang-undang penal, telah menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mencegah kembalinya aksi terorisme.³⁸ Langkah penanggulangan tindak pidana terorisme dari perspektif kriminologi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi, mengingat kompleksitas faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini. Upaya penanggulangan terorisme di Jawa Tengah mengalami kendala: pertama, mantan napiter masih radikal, berpotensi menjadi residivis. Pada Desember 2022, tercatat 248 mantan napiter, terdiri dari 244 laki-laki, 4 perempuan tersebar di Jawa Tengah. Dari jumlah itu 79 orang masih radikal, menyebarkan paham terorisme³⁹ secara *off line*, *online*, menjalankan politik *taqiyah* agar tidak diawasi dan mendapatkan bantuan finasial dari BNPT, Densus 88 AT, instansi lain.

Kedua, lunturnya budaya gotong royong, masyarakat permisif kepada kelompok teroris. Saat ini masyarakat kebanyakan enggan mengadakan gotong royong, kurang peduli pada lingkungan, pendatang yang menetap sementara. Sikap permisif ini dimanfaatkan kelompok teroris untuk berkembang, merencanakan aksi teror. Ketiga, sanksi terhadap lembaga pendidikan, lembaga amal kelompok radikal-teroris masih lemah. Pada Januari 2022, BNPT merilis 198 pesantren, lembaga pendidikan, lembaga amal berafiliasi dengan jaringan teror.⁴⁰ Pasca data itu dirilis, kelompok teroris menjaga jarak dengan jaringannya. Sebagian mendirikan Rumah Qur'an, lembaga amal ilegal yang tersebar di Jawa

³⁵Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

³⁶Salah dan Anwar, "Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalasi Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximun Security."

³⁷ Lina Maryani and Tabah Sulisty, "Pemulangan 'Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)' Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 497–512, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>.

³⁸ Erdianto Effendi and Tito Handoko, "Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal USM Law Review L* 6, no. 3 (2023): 1124, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7579>.

³⁹Raider Satria Paulus, "BIN Sebut Terorisme Jadi Potensi Ancaman Natal Dan Tahun Baru Di Jawa Tengah," *Pikiran Rakyat*, 2022.

⁴⁰Wilda Hayatun Nufus, "Data 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Teror Jadi Polemik, BNPT Buka Suara," *Detik News*, 2022.

Tengah dikelola JI, JAD, JAK. Hal ini menjadi kendala BNPT, Densus 88 AT dalam mengambil tindakan hukum, mengingat pembekuan lembaga itu berpotensi memicu ketidakharmonisan relasi umat beragama dengan pemerintah.

Mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan strategi yang terstruktur dan adaptif terhadap dinamika terorisme yang terus berkembang. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam deteksi dan pencegahan dini akibat kurangnya intelijen yang akurat dan kerjasama internasional. Solusi untuk ini adalah memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran informasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas teknis dan pelatihan personel dalam teknologi terkini. Selain itu tetap melakukan pembinaan dan monitoring mantan napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam disertai pengawasan lingkaran sosial mantan napiter oleh intelijen untuk memastikan mantan napiter tidak kembali terlibat terorisme.

Kedua, program *jogo tonggo* untuk pencegahan terorisme, melalui program ini akan mempersempit ruang gerak teroris yang selalu mempelajari lingkungan yang akan ditempati untuk meminimalisir kecurigaan masyarakat, pelacakan intelijen. *Jogo tonggo* dengan nilai-nilai kearifan lokal⁴¹ dapat digunakan sebagai alat deteksi dini⁴² untuk mencegah ancaman terorisme.⁴³ Potensi Jawa Tengah: ⁶ Kader PKK, Dasa Wisma, Satlinmas, kader Posyandu, Kelompok Tani, Taruna Siaga Bencana, kader pemberdayaan masyarakat desa, Gapoktan, ¹³ penyuluhan swadaya, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, relawan desa, karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat merupakan modal dasar untuk penanggulangan terorisme melalui implementasi sederhana dengan memberikan pemahaman bahaya terorisme kepada perangkat desa dan teknis pendataan ulang pendatang, penduduk yang belum memiliki identitas kependudukan.⁴⁴ Upaya ini untuk memperkuat *database* kependudukan, mitigasi wilayah rawan terorisme. Penerapan *jogo tonggo* ini merupakan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, karena masyarakat memiliki peran sentral untuk pencegahan kejahatan, serta kesadaran mengidentifikasi, menanggapi kebutuhan rasa aman untuk jangka panjang dan jangka pendek sehingga dalam pencegahan itu memerlukan partisipasi individu, dukung masyarakat.⁴⁵ Pemerintah berperan melalui intervensi

⁴¹Shodiq, “Jogo Tonggo” Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19.”

⁴² Bidang Ikp, “Tepis Terorisme, Ketua FKPT Jateng Ajak Warga Terapkan Jogo Tonggo,” Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022.

⁴³Nur Istibaroh, “DPRD Jateng Minta Program Jogo Tonggo Dimaksimalkan Untuk Cegah Potensi Ancaman Terorisme Di Masyarakat,” Antara News, 2021, <https://jateng.antaranews.com/berita/379826/dprd-jateng-minta-program-jogo-tonggo-dimaksimalkan-untuk-cegah-potensi-ancaman-terorisme-di-masyarakat>.

⁴⁴Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah, “Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah” (2022), https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pergub_35_th_2022.

⁴⁵Andra Fahreza, “Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi,” Jurnal Sosiologi Nusantara 6, no. 1 (2020): 13–22, <https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.13-22>.

kebijakan, penyediaan fasilitas pendukung, perbaikan kapasitas anggota masyarakat yang terlibat pencegahan terorisme.

Ketiga, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan (RAD PE) di Jawa Tengah.⁴⁶ RAD PE disusun berdasarkan kebutuhan daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan terorisme: a. Memperkuat data base kependudukan, mitigasi wilayah rawan terorisme. b. Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai resiko ekstremisme, terorisme, kesiapsiagaan. c. Meningkatkan efektivitas kontra radikalisasi dan daya tahan di kelompok rentan. d. Deradikalisasi, e. Pemberian bantuan untuk saksi dan/atau korban terorisme melalui pemberian akses keadilan dengan konseling peka gender, pemulihan jangka panjang. f. Koordinasi, pemantauan dan laporan.⁴⁷

Keempat, dengan melakukan pemberdayaan ekonomi mantan napiter, mengingat pasca menjalani pidana, ekonomi mantan napiter mayoritas minus, tidak bisa menghidupi diri sendiri dan keluarganya, sehingga rentan direkrut untuk kembali melakukan aksi teror.⁴⁸ Untuk itu, BNPT, Densus 88 AT menjalankan program ekonomi untuk mantan napiter berupa program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Jawa Tengah. Terakhir, masalah kebijakan dan hukum yang tidak memadai dalam menangani kasus terorisme juga harus diperhatikan. Perlu ada undang-undang antiterorisme yang tegas dan memenuhi hak asasi manusia internasional. Peningkatan kapasitas sistem peradilan, termasuk pelatihan khusus untuk hakim dan penegak hukum dalam menangani kasus terorisme, harus diimbangi dengan penguatan kerangka kerja legislatif ini. Strategi penanggulangan terorisme dapat menjadi lebih berkelanjutan dan lebih efektif dalam mengurangi ancaman terorisme lokal maupun internasional dengan mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh.

4. PENUTUP

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi: identifikasi karakter dan pendanaan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, antisipasi penyebaran radikal terorisme di Lapas. Kendala penanggulangan terorisme: napiter, mantan napiter masih radikal, masyarakat permisif kepada kelompok teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal ilegal kelompok teroris lemah. Solusi mengatasi kendala itu: pembinaan dan monitoring mantan napiter, program *jogo tonggo*, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan (RAD PE), pemberdayaan ekonomi mantan napiter.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, Mohammad Hasan, Imron Rasyid, Muhamad Arif, Sopar Peranto, Johari Efendi, and Vidya Hatugalung. “*Memberantas Terorisme Di Indonesia:*

⁴⁶ Parwoto, “Wawancara.”

⁴⁷ “Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah.”

⁴⁸ Wartoyo, “Wawancara” (Brebes, 2022).

- Praktik, Kebijakan Dan Tantangan.” The Habibie Center.* Vol. 1, 2019.
- Ari Supriyanti Rikin. “Jogo Tonggo Kearifan Lokal Jateng Atasi Dampak Covid-19.” *Berita Satu*, 2020.
- Arifin, Zaenal, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng. “Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.” *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762>.
- Bagus Santosa. “Benda Mirip Bom Di Klaten Ternyata Kotoran Sapi.” *Okezone*, 2010.
- BBC, Tim. “Mako Brimob Purwokerto ‘Ditembak Orang Tidak Dikenal’, Seorang Anggota Polisi Terluka.” *BBC*, 2019.
- BNPT. “BNPT RI Bersinergi Dengan Universitas Tidar Dukung Keberhasilan Program Derasifikasi Di Temanggung.” BNPT, 2023.
- . “Kepala BNPT Harap Kawasan Terpadu Nusantara Di Wilayah Provinsi Lainnya Dapat Segera Di Diresmikan.” BNPT, 2022.
- . “Tim Sinergitas BNPT Siapkan Pembentukan Koperasi Di KTN Batang, Jawa Tengah.” BNPT, 2022.
- BNPT, I-khub. “Counter Terrorism And Violent Extremism,” 2023.
- Bram, Damianus. “Polri Rangkul Eks Napi Teroris Berdayakan Ekonomi Keluarga.” *Radar Solo*, 2022.
- Budijanto, Oki Wahju, and Tony Yuri Rahmanto. “Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.
- Contantinus, Fatlolon. *Masalah Terorisme Global Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi Dunia Kehidupan Oleh Sistem Modern*. Edited by Widiantoro. 6th ed. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Devina Halim, Aprilia Ika. “Pelaku Bom Bunuh Diri Di Pos Polisi Kartasura Terpapar ISIS Dan Merupakan Lone Wolf.” *Kompas*, 2019.
- Effendi, Erdianto, and Tito Handoko. “Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal USM Law Review L* 6, no. 3 (2023): 1124. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7579>.
- Fahreza, Andra. “Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi.” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6, no. 1 (2020): 13–22. <https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.13-22>.
- Farouk, Arnaz. “Kelompok Abu Roban Rampok 10 Tempat.” *Beritasatu*, 2013.
- Frank E. Hagan. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Edited by A.K Anwar dan Triwiboso BS. 7th ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013.
- Guntara, Deny, and . Budiman. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association.” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 106–19. <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.553>.
- Guntur Yuyus Putra, Sapto Priyono. “Mengungkap Perekutan Jaringan Kelompok Teror Muhammadiyah At-Tauhid (MAT) Di Media Sosial.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 7 (2021): 2247–62.
- Idris, Irfan. *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi Dan Program Penanggulangan Terorisme*. Edited by Ardi dan Toto. 1st ed. Yogyakarta: Cahaya Insani, 2018.

- Ikp, Bidang. "Tepis Terorisme, Ketua FKPT Jateng Ajak Warga Terapkan Jogo Tonggo." Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022.
- Inadha Rahma Nidya, Mikhael Gewati. "Bentuk Satgas Jogo Tonggo, Ganjar Ajak Masyarakat Desa Saling Jaga." *Kompas*, 2020.
- Iqbal Fahmi. "Ini Kronologi Penyerangan Mapolres Banyumas Versi Densus 88." *Kompas*, 2017.
- JP alias KK. "Wawancara." Semarang, 2022.
- Kurniawan, Syukri, Anditya Rahayu Putri, Tendy Septiyo, and Pujiyono Pujiyono. "Upaya Non-Penal Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 1 (2020): 14. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.468>.
- Mardlatillah, E A M, and Z Hidayat. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang." *Journal Of Public Policy And Management Review* 8 (2019): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.25128>.
- Maryani, Lina, and Tabah Sulistyo. "Pemulangan 'Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)' Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 497–512. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>.
- Muh Syaifullah. "Dua Polisi Purworejo Ditemukan Tewas Tertembak Di Pos Jaga." *Tempo*, 2010.
- Mw, Kasus, and Alias Wg. "Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme: Studi Kasus Mw Alias Wg." *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1036>.
- Negara, Perusahaan Umum Kehutanan. "Perhutani Ikut Soft Opening Kawasan Terpadu Nusantara Di Temanggung." Tim Perhutani, 2022.
- Nur Istibsaroh. "DPRD Jateng Minta Program Jogo Tonggo Dimaksimalkan Untuk Cegah Potensi Ancaman Terorisme Di Masyarakat." *Antara News*, 2021.
- One, Reporter Tv. "Pria Bersenjata Tajam Yang Serang Wakapolres Karanganyar Jadi Buronan Polisi." *Tv One News*, 2020.
- Pakar, Tim. "9 Lembaga Amal Pendukung Terorisme." Redaksi Pakar, 2020.
- Parwoto. "Wawancara." Solo, 2023.
- "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah" (2022).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Nomor 65 § (2017).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (2019).
- Permata, Clarisa, and Hariono Putri. "Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme" 30, no. 1 (2023): 70–90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>.
- Pramana, Jaka, Gomgom T P Siregar, Syawal Amry Siregar, and Universitas Darma Agung. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 3 (2022): 1–9.
- Raider Satria Paulus. "BIN Sebut Terorisme Jadi Potensi Ancaman Natal Dan Tahun Baru Di Jawa Tengah." *Pikiran Rakyat*, 2022.
- Renaldi, Adi. "'Pemboman Candi Borobudur, 1985, Aksi Terorisme Agama

- Paling Misterius Era Orde Baru.”” Vice.com, 2020.
- Rini Tustiningsih. “Polsek Pasar Kliwon Solo Diteror Bukan Kasus Pertama.” *Solo Pos*, 2012.
- Salah, Adhika Yovaldi, and Umar Anwar. “Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximun Security.” *Journal of Correctional Issue* 4, no. 1 (2021): 33–45.
- Shodiq, Moh Djafar. “Doktrin Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial Di Indonesia” 15 (2021): 1–6.
- Shodiq, Muh Fajar. “‘Jogo Tonggo’ Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (March 2021): 423–40. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19412>.
- Sholehuddin. *Harmoni Untuk NKRI Panduan Praktis Cegah Teroris*. Edited by Syukri Ghozali Andi Subhan Maggalantung. 1st ed. Tangerang: Pusat Kajian Moderasi Beragama, 2022.
- Tim Liputan6. “Bom Kembali Menguncang Semarang.” Liputan6, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Und (2018).
- Wartoyo. “Wawancara.” Brebes, 2022.
- Widajatun, Vincentia Wahju, Nugi M Nugraha, and Sakina Ichsan. “Kejadian Aksi Teroris Dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa Ihsg.” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 141. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.3415>.
- Wilda Hayatun Nufus. “Data 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Teror Jadi Polemik, BNPT Buka Suara.” *Detik News*, 2022.
- Yulis Sulistyawan. “Kronologi Bom Gereja Kepunden Solo.” *Tribune News*, 2011.
- Zulianto, Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono. “Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 419. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>.

● 12% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 12% Internet database
- Crossref database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	peraturan.bpk.go.id	2%
	Internet	
2	ejournal.iahntp.ac.id	1%
	Internet	
3	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
4	Lina Maryani, Tabah Sulistyo. "PEMULANGAN "WARGA NEGARA INDO..."	<1%
	Crossref	
5	ejournal3.undip.ac.id	<1%
	Internet	
6	reportindonesia.com	<1%
	Internet	
7	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
8	123dok.com	<1%
	Internet	
9	jurnal.anfa.co.id	<1%
	Internet	

- 10 [jurnal.fkip.unila.ac.id](#) <1%
Internet
- 11 [repository.upstegal.ac.id](#) <1%
Internet
- 12 [lpgnsugih.kemenkumham.go.id](#) <1%
Internet
- 13 [journal.uinjkt.ac.id](#) <1%
Internet
- 14 [jogloabang.com](#) <1%
Internet
- 15 [news.indozone.id](#) <1%
Internet
- 16 [ojs.uninus.ac.id](#) <1%
Internet
- 17 [openjournal.unpam.ac.id](#) <1%
Internet
- 18 [jurnal.syntaxliterate.co.id](#) <1%
Internet
- 19 [ejournal.unesa.ac.id](#) <1%
Internet
- 20 [Permatasari, Acika. "Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab PPAT Atas P...](#) <1%
Publication
- 21 [doaj.org](#) <1%
Internet

22	eprints.ums.ac.id	<1%
	Internet	
23	infid.org	<1%
	Internet	
24	lppsemarang.kemenkumham.go.id	<1%
	Internet	
25	marzanianwar.wordpress.com	<1%
	Internet	
26	pushep.or.id	<1%
	Internet	
27	sialim.radenfatah.ac.id	<1%
	Internet	
28	bbc.com	<1%
	Internet	
29	grafiati.com	<1%
	Internet	
30	researchgate.net	<1%
	Internet	
31	lonsuit.unismuhluwuk.ac.id	<1%
	Internet	

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
 - Quoted material
 - Manually excluded text blocks
 - Bibliographic material
 - Cited material
-

EXCLUDED SOURCES

Website

journals.usm.ac.id 5%
Internet

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Masalah Terorisme Global Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi Dunia
repository.stfkledalero.ac.id

Wahju Widajatun, Nugi M Nugraha

dilib.uinsa.ac.id

Pemboman Candi Borobudur, 1985, Aksi Terorisme Agama Paling Misterius Era Orde Baru

linktr.ee

3

repository.radenintan.ac.id

Ini Kronologi Penyerangan Mapolres Banyumas Versi Densus 88

lipsus.kompas.com

Pelaku Bom Bunuh Diri Di Pos Polisi Kartasura Terpapar ISIS Dan Merupakan Lone Wolf

megapolitan.kompas.com

Mako Brimob Purwokerto 'Ditembak Orang Tidak Dikenal', Seorang Anggota Polisi Tewas

www.bbc.com

Pria Bersenjata Tajam Yang Serang Wakapolres Karanganyar Jadi Buronan Polisi

www.tvonews.com

regional.kompas.com/read/2017/06/20/14505331/ini.kronologi.penyerangan.ma...

www.jstor.org

Wahju Budijanto

jurnal.fh.unila.ac.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undan...

eprints.walisongo.ac.id

Menteri Hukum

ojs.uho.ac.id

dan Umar Anwar, "Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi ...

digilib.uinsa.ac.id

Nomor 65, no. 879

repository.radenintan.ac.id

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 Te...

ojs.uho.ac.id

Lina Maryani

repository.ubharajaya.ac.id

Anwar, "Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembag...

digilib.uinsa.ac.id

Terorisme Jadi Potensi Ancaman Natal Dan Tahun Baru Di

mycity.co.id

no. 2

repository.umi.ac.id

Fahreza, "Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Foru...
repository.unsri.ac.id

DPRD Jateng Minta

jateng.antaranews.com

Tepis Terorisme, Ketua FKPT Jateng Ajak Warga Terapkan Jogo Tonggo,"Pemerin...
jatengprov.go.id

Jawa Tengah, "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun2022 Tentang P...
daerah.peraturanpedia.id

dprd-jateng-minta-program-jogo-tonggo-dimaksimalkan-untuk-cegah-potensi-anc...
jateng.antaranews.com

13–22,https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.13-22

jurnal.unpad.ac.id

Jogo Tonggo' Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19

nopren.ucsf.edu

https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail

journal.uns.ac.id

Upaya Non-Penal Dalam

doaj.org

Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia"Jur...
openjournal.unpam.ac.id

Arifin, Aisah Nur

ojs.uniska-bjm.ac.id

Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi EksNapiter Di Wilayah Kota ...
stp-mataram.e-journal.id

Hugeng, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
ojs.uniska-bjm.ac.id

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1321>
jurnal.darmaagung.ac.id

<https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.25128>
journal.unnes.ac.id

https
ojs3.unpatti.ac.id

Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15Tahun 2...
openresearch-repository.anu.edu.au

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme DiIndonesia Dala...
journal.unnes.ac.id

At-Tauhid (MAT) Di Media Sosial," Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial 8
media.neliti.com

Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah DibatalkanStatus Huku...
sinta.lldikti6.id

Jurnal Usm Law Review 3, no. 2 (2020)
www.researchgate.net